



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
SEKRETARIAT DPRD**

# **RENSTRA**

**RENCANA STRATEGIS 2021-2026**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH**

**2021**

## KATA PENGANTAR

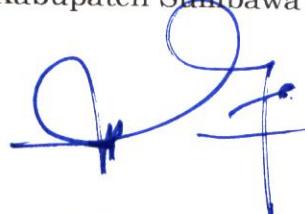
Puji syukur dipanjangkan kepada Allah Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2021-2026 yang telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat waktu.

Renstra ini merupakan panduan pelaksanakan tugas pokok dan fungsi SEKRETARIAT DPRD Kabupaten untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan tercapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama sehingga Renstra ini dapat disusun. Semoga pada masa mendatang, dokumen Rencana Strategis SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta dapat mengakomodir isu-isu strategis daerah.

Taliwang, 24 September 2021

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Sumbawa Barat,



**Ir. IRHAS R.RAYES, M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19651102 199003 1 011

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD .....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan .....	36
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	38
3.2 Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	39
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	43
<b>BAB VI TUJUAN DAN SASARAN SKPD.....</b>	45
4.1. Tujuan.....	45
4.2. Sasaran.....	45
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....</b>	48
<b>BAB IV RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....</b>	51
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	53
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nonior 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secarpartisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Renstra OPD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola

organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan Perundangan-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra ini sebagai berikut:

- 1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
6. Undang -undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8.Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Perpu No.3 Tahun 2005 Jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 10.Undang -undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;
- 16.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
- 16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012–2031;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11); dan

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dimaksudkan untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan **Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan** untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

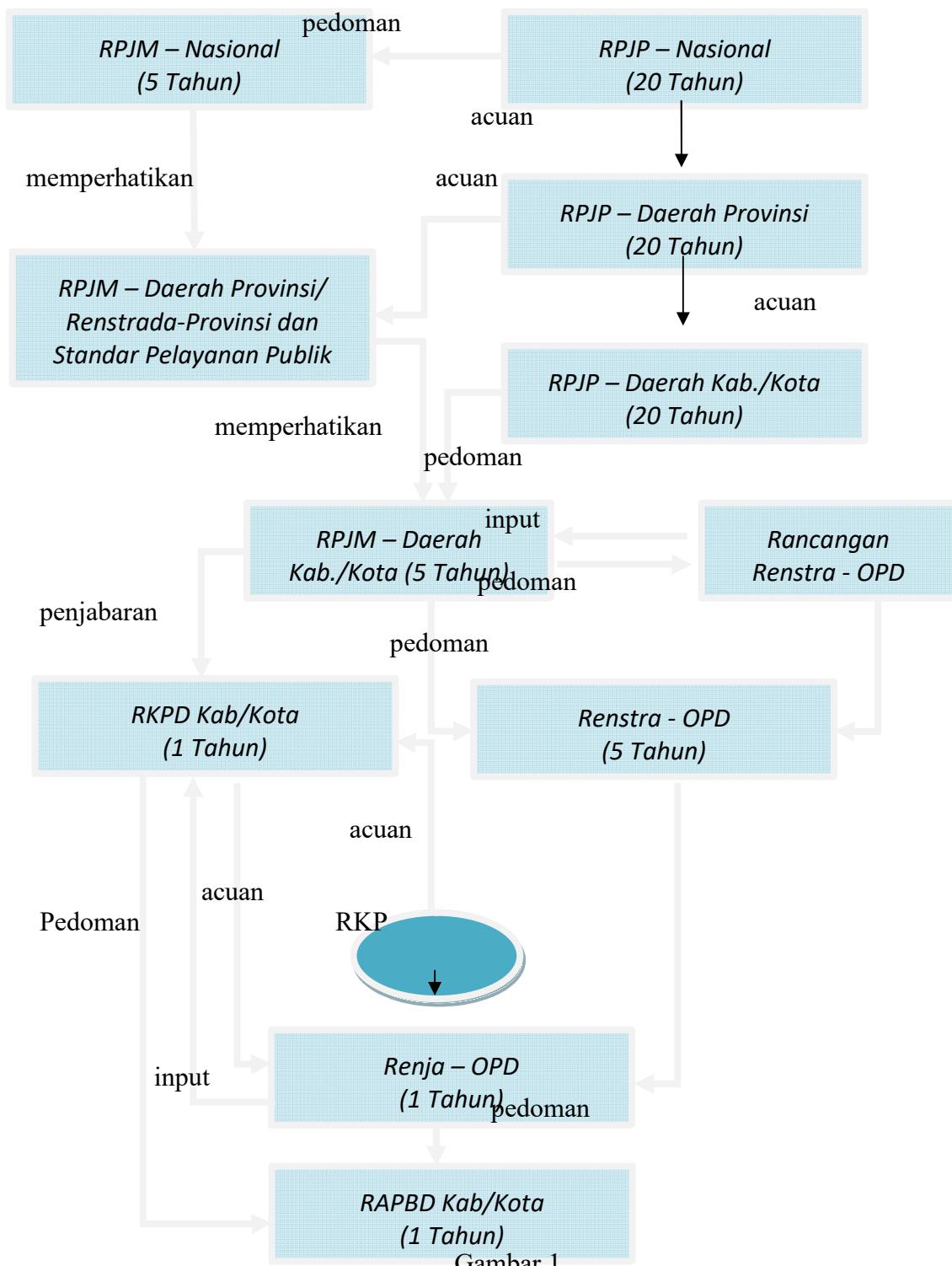
Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

Sekretariat DPRD sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sehingga tidak dapat dilepas pisahkan dari Visi dan Misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat secara keseluruhan. Atas dasar itulah, Rencana Strategis Sekretariat

DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2021–2026 disusun dengan memperhatikan RPJMD Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat Periode 2021-2026, atau dengan kata lain Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

## Hubungan Renstra-OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Hubungan Renstra – OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
  - 2.1.2 Struktur organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Sumberdaya aparatur
  - 2.2.2 Sumberdaya aset
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3.1 Kinerja OPD
  - 2.3.2 Kinerja Keuangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

### **IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

### **V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - 2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- c. Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Humas terdiri dari :
  - 1. Subbagian Persidangan dan Risalah
  - 2. Subbagian Perundang-undangan dan Humas
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
  - 1. Subbagian Perencanaan
  - 2. Subbagian Keuangan

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok antara lain sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3. Fasilit Penyelenggaraan Persidangan dan Rapat-rapat DPRD;

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan pendampingan dalam kegiatan alat kelengkapan dan anggota DPRD ; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan, dan urusan dalam;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi pelaksanaan persidangan DPRD;
- d. Fasilitasi penyusunan Perundang-undangan DPRD;

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari :

### **1. Sekretaris**

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3. Mengakomodir rapat-rapat DPRD;
4. Melaksanakan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **2. Bagian Umum**

Bagian Umum dipimpin oleh seseorang kepala bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas mengatur dan membina urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, pengamanan, perlengkapan sekretariat DPRD dan DPRD. selain tugas tersebut juga mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi umum sekretariat DPRD dan DPRD;

2. Penyusunan program dan kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga, pengamanan, perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD;
3. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD;
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian, pengamanan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum terdiri dari dua subbagian yang dikepalai oleh Kasubbag yang terdiri atas :

**a) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga**

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas pokok kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan urusan perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD;
2. Penyusunan Program dan Rencana Kerja kegiatan urusan perlengkapan dan rumah tangga Sekretarioat DPRD dan DPRD;
3. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan perlenkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD;
4. Penyelenggaraan kegiatan urusan perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD dan DPRD;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

**b) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian**

Selain menjalankan tugas pokok kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha Dan Kepegawaian ;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Menata Arsip Kepegawaian Anggota DPRD;
4. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul;
5. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur;
6. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan;
7. Menyiapkan bahan pengadaan surat-surat dinas;
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
9. Mengendalikan surat-surat masuk dan keluar pimpinan DPRD;
10. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
11. Mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data kepegawaian Sekretariat DPRD dan DPRD;
12. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai Sekretariat DPRD;
13. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai Sekretariat DPRD;
14. Menyiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, dan pensiun pegawai Sekretariat DPRD;
15. Menyiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
16. Melaksanakan Study Banding Aparatur;
17. Menyiapkan bahan surat cuti pegawai Sekretariat DPRD melakukan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan pendistribusian surat;

19. Mengelola urusan administrasi tenaga kontrak, satpam dan tenaga sukarela;
20. Memfasilitasi pelaksanaan pengamanan oleh Satpam dan pelaksanaan ketertiban dalam lingkup Sekretariat DPRD dan DPRD;
21. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
22. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkordinasikan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perencanaan keuangan dan pengelolaan anggaran belanja DPRD dan sekertariat DPRD;
- b. Melaksanakan pengelolaan ademinstiras keuangan sesuai beban pengeluaran anggaran dan belanja SKPD
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi dalam hal penyusunan sistem akutansi
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan
- e. Menyiapkan masukan kepada sekretaris DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
- f. Menyeleggarakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keuangan terdiri atas dua subbagian yang dikepalai oleh Kasubbag yang terdiri atas :

**a) Subbagian Perencanaan**

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Subbagian Perencanaan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun program dan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur;
5. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD dan DPRD;
6. Menyusun standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Menyiapkan bahan kerja sama pembahasan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka persiapan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sekretariat DPRD dan DPRD ;
8. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD dan DPRD;
9. Mengompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan dari masing- masing unit kerja;
10. Mengelola data dan informasi hasil evaluasi dan pengawasan oleh DPRD terhadap rencana kerja perangkat daerah;
11. Mengelola data dan informasi perencanaan hasil kegiatan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
12. Menyiapkan bahan koordinasi hasil evaluasi DPRD terhadap perencanaan dan program kerja Perangkat Daerah;
13. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD;
14. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra),
15. Menyiapkan bahan dan Menyusun Rencana Kerja (Renja),
16. Menyiapkan bahan dan Menyusun Indikator Kinerja Utama;

17. Menyiapkan bahan dan Menyusun Rencana Kerja Tahunan;
18. Menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
19. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah;
20. Menyiapkan bahan dan Laporan Hasil Penyerapan Aspirasi;
21. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
22. Menyiapkan bahan dan data untuk mendukung kegiatan penyusunan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
23. Melakukan penyusunan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
24. Melakukan penyiapan laporan dan statistik Sekretariat DPRD dan DPRD;
25. Melakukan penyiapan dokumentasi dan pengolahan data program;
26. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan perencanaan;
27. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD;
28. Memberikan saran pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Subagian Keuangan**

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Subbagian Keuangan mempunyai Fungsi :

1. Menyusun program dan rencana kerja Subbagian Keuangan Dan Pelaporan;
2. Membagi tugas, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai permasalahan dan prosedurnya berdasar peraturan peundang undangan;
3. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;

4. Menyusun standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tata usaha keuangan;
5. Melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan;
6. Meneliti, memeriksa kelengkapan, dan keabsahan bukti-bukti laporan pertanggung jawaban keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
7. Meneliti kebenaran penggunaan dan peruntukan anggaran sesuai dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melakukan pengelolaan administrasi penyediaan dana/anggaran serta menyiapkan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
9. Mengkoordinasikan bahan penyusunan dan perhitungan rencana anggaran, Sekretariat DPRD dan DPRD;
10. Melakukan pengujian, penelitian, dan pemeriksaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat DPRD dan DPRD;
11. Menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat DPRD dan DPRD;
12. Mencatat/meregister penyediaan dana, penerbitan SPP dan SPM serta pencairan dana Sekretariat DPRD dan DPRD;
13. Meneliti kelengkapan SPP langsung untuk gaji dan tunjangan lainnya, mencatat dan gaji dan tunjangan lainnya termasuk pengadaan barang dan jasa;
14. Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan, SPP Ganti Uang dan SPP Tambahan Uang yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
15. Membuat surat penolakan atas kesalahan dokumen pertanggungjawaban;
16. Mencatat/meregister penerimaan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban serta surat penolakan pertanggungjawaban;
17. Menyusun laporan realisasi anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD, catatan atas laporan keuangan, dan neraca;

18. Mengelola data dan informasi hasil capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan DPRD;
19. Menyiapkan bahan koordinasi :
  - 1) penyusunan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
  - 2) hasil evaluasi dan pengawasan DPRD terhadap hasil kinerja Pemerintah Daerah;
20. Menghimpun dan menyiapkan bahan kajian kebijakan pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
21. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Humas**

Bagian persidangan, perundang-undangan dan Humas mempunyai tugas meyiapkan rapat yang di selenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun tata tempat,pembuatan risalah, serta dokumentasi hasil rapat DPRD.Kepala persidangan risalah dan dokumentasi di bantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Persidangan dan Dokumentasi dan Kepala Sub Bagian perundang-undangan dan Humas:

##### **a) Subbagian Persidangan dan Risalah**

Sub Bagian Persidangan dan Risalah dalam menjalankan tugas juga mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kerja Subbagian Persidangan Dan Dokumentasi;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul;

4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur;
5. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan;
6. Menyusun standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan urusan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
8. Menyiapkan kebutuhan konsumsi sidang paripurna dan bahan kebutuhan teknis persidangan dan rapat-rapat DPRD;
9. Menyiapkan rencana pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
10. Mengkoordinasikan, mengumpulkan data, informasi dan kajian kepustakaan sebagai bahan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
11. Menyusun naskah pidato sambutan pimpinan DPRD dan risalah sidang pada persidangan dan rapat-rapat DPRD;
12. Menyiapkan rancangan keputusan DPRD;
13. Menyiapkan bahan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah;
14. Melaksanakan notulasi persidangan dan rapat-rapat DPRD;
15. Melaksanakan dokumentasi persidangan dan rapat-rapat DPRD;
16. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
17. Mengoordinasikan kegiatan para pendamping dan kelompok pakar alat kelengkapan DPRD;
18. Mengelola perpustakaan DPRD sebagai sumber informasi kepustakaan dalam penyusunan naskah pidato Pimpinan DPRD;
19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan persidangan dan dokumentasi ;
20. Menyiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Anggota DPRD;
21. Menyiapkan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

22. Memberikan saran pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Sub Bagian Perundang-undangan dan Humas**

Sub bagian perundang-undangan dan Humas dalam melaksanakan tugas juga mempunyai fungsi yaitu :

1. Merencanakan kegiatan Subbagian Peraturan Perundang-Undangan Dan Humas;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur;
5. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan;
6. Menyusun standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan DPRD dan memfasilitasi penyusunan naskah peraturan daerah inisiatif DPRD
8. Menyiapkan bahan penyusunan keputusan pimpinan DPRD, keputusan badan kehormatan DPRD dan keputusan Sekretaris DPRD;
9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan perundangan undangan dan humas;
10. Menghimpun, mengklarifikasi dan melaksanakan sosialisasi produk hukum DPRD serta peraturan perundang-undangan/ peraturan daerah yang ditetapkan melalui paripurna DPRD;
11. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD;
12. Menyiapkan bahan penyusunan pendapat dan pertimbangan DPRD yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah

- terhadap rancangan perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman bersama yang menyangkut kepentingan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Melakukan analisa dan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD dan kegiatan Sekretariat DPRD;
  14. Mengumpulkan dan menyiapkan referensi peraturan perundang-undangan;
  15. Melakukan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  16. Menyiapkan bahan dan telaahan hukum terhadap kegiatan alat kelengkapan DPRD;
  17. Mengelola website DPRD dan menjadi bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
  18. Melaksanakan fasilitasi pendampingan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat-rapat, kunjungan kerja dan study banding di dalam dan di luar daerah ;
  19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan peraturan perundang-undangan dan humas;
  20. Memberikan saran pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1  
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD  
Kabupaten Sumbawa Barat



## 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 139 orang yaitu yang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil dan 116 orang Non Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel.1.1. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan**

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekretaris DPRD (Sekwan)	1	
2.	Kepala Bagian	3	
3	Kasubbag	6	
4	Staf Sekretariat	129	
<b>Jumlah</b>		<b>139</b>	

**Tabel. 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV/c	1	
2	Golongan IV/b	2	
3	Golongan IV/a	1	
4	Golongan III/d	3	
5	Golongan III/c	3	
6	Golongan III/b	1	
7	Golongan III/a	4	
8	Golongan II/d	1	
9	Golongan II/c	1	
10	Golongan II/b	5	
11	Golongan II/a	1	
12	Golongan I /a	-	
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	

**Tabel. 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Magister S-2	3	
2	Sarjana S-1	60	
3	Sarmud/ DIII	12	
4	SLTA	60	
5	SLTP	4	
<b>Jumlah</b>		<b>139</b>	

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut

**Tabel 4. Data Inventaris Barang Sekretariat DPRD**

**DAFTAR BARANG INVENTARIS**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021**

NO		SPESIFIKASI BARANG			Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
		Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	1	A.C. Window	-	-	Pembelian	2016		Baik	2
	2	A.C. Window	-	-	Pembelian	2017		Baik	2
	3	A.C. Window	Polytron	-	Pembelian	2017		Baik	4
	4	A.C. Split	polytron 0,5 pk	-	Pembelian	2015		Baik	11
	5	A.C. Split	LG	-	Pembelian	2016		Baik	31
	6	A.C. Split	LG	-	Pembelian	2016		Baik	1
	7	A.C. Split	LG	-	Pembelian	2016		Baik	1
	8	A.C. Split	LG	-	Pembelian	2017		Baik	2
	9	A.C. Split	LG	-	Pembelian	2017		Baik	3
	10	A.C. Split	LG	-	Pembelian	2017		Baik	8
	11	A.C. Split	LG / Dual Inverter	-	Pembelian	2020		Baik	3
	12	A.C. Split	Sharp / AH-ASUCY	-	Pembelian	2021		Baik	2
									70
2	1	Sedan	Toyota /Corolla 1.8 G	MR053ZEC2-77405438	Pembelian	2010	1794	Baik	1
	2	Station Wagon	Suzuki / APV	MHYGDN41V7J-150713	pembelian	2007		Baik	1
	3	Station Wagon	Toyota / Avanza	MHFM1BA3JAK259876	Pembelian	2010	1297	Baik	1
	4	Station Wagon	Toyota / KijangLSX KF-83	MHF11KF80340117270	Pembelian	2010	1781	Baik	1
	5	Station Wagon	Toyota /Fortuner 4x4	MHFYX59G1C8039251	Pembelian	2012		Baik	1
	6	Station Wagon	Toyota /Fortuner	MHFZX69G4C7043813	Pembelian	2012		Baik	1
	7	Station Wagon	Toyota /Fortuner	MHFZX69G8C7042177	Pembelian	2012		Baik	1
	8	Sepeda Motor	Honda NF 100 L / SUPRA FIT	MH1HB1175K752584	pembelian	2005	100	Baik	1
	9	Sepeda Motor	Honda NF 100 SLD / SUPRA FIT	MH1HB1166K520562	pembelian	2006	100	Baik	1
	10	Sepeda Motor	Honda NF 100 SLD / SUPRA FIT	MH1HB41156K520567	pembelian	2006	100	Baik	1
	11	Sepeda Motor	Honda / Vario	MH1JF8118CK595979	Pembelian	2012		Baik	1
	12	Sepeda Motor	Honda / Vario	MH1JF8118CK595983	Pembelian	2012		Baik	1
	13	Sepeda Motor	Honda / Vario	MH1JFY116GK065369	Pembelian	2016		Baik	1
	14	Sepeda Motor	Yamaha /Matic-Aerox B65	MH3SG4610JJ186016	Pembelian	2019	155	Baik	1
	15	Sepeda Motor	Yamaha /Matic-Aerox B65	MH3SG4610JJ186106	Pembelian	2019	155	Baik	1
									15
3	1	Kursi Rapat	chitose	-	Pembelian	2011		Baik	260
	2	Kursi Rapat	Chitose	-	Pembelian	2014		Baik	314
	3	Kursi Rapat	Chitose	-	Pembelian	2014		Baik	1
	4	Kursi Rapat	-	-	Pembelian	2017		Baik	10
	5	Kursi Rapat	Chairman	-	Pembelian	2017		Baik	100
	6	Kursi Tamu	-	-	Pembelian	2016		Baik	2
	7	Kursi Tamu	-	-	Pembelian	2016		Baik	2
	8	Kursi Tamu	-	-	Pembelian	2016		Baik	2
	9	Kursi Tamu	-	-	Pembelian	2016		Baik	22
	10	Kursi Tamu	-	-	Pembelian	2016		Baik	1
	11	Kursi Tamu	-	-	Pembelian	2016		Baik	1
	12	Kursi Tamu	-	-	Pembelian	2016		Baik	1
	13	Kursi Tamu	-	-	Pembelian	2017		Baik	2
	14	Sofa	-	-	Pembelian	2018		Baik	2
	15	Sofa	-	-	Pembelian	2020		Baik	2
	16	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Informa / President 9103 Dir Chair Brown	-	Pembelian	2021		Baik	1
	17	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	Pembelian	2013		Baik	5
	18	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	-	pembelian	2005		Baik	7
	19	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Tiger	-	Pembelian	2015		Baik	25
	20	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Informa / Dimension	58*25.5*553 cm	Pembelian	2020		Baik	10

21	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Informa / Dimension : 93.5x44x62cm	-	Pembelian	2020		Baik	1
22	Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	lokal	-	Pembelian	2012		Baik	8
23	Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	-	-	Pembelian	2017		Baik	15
24	Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD	-	-	Pembelian	2015		Baik	2
25	Kursi Dorong	JBH Electric	-	Pembelian	2020		Baik	1

797

4	1	Meja Kerja Kayu	-	-	Pembelian	2021		Baik	4
	2	Meja Rapat	lokal	-	Pembelian	2011		Baik	22
	3	Meja Rapat	-	-	Pembelian	2017		Baik	3
	4	Meja Rapat	-	-	Pembelian	2017		Baik	1
	5	Meja Rapat	-	-	Pembelian	2018		Baik	6
	6	Meja Podium	lokal	-	pembelian	2006		Baik	2
	7	Meja 1/2 Biro	lokal	-	hibah	2004		Baik	3
	8	Meja 1/2 Biro	lokal	-	pembelian	2006		Baik	4
	9	Meja 1/2 Biro	lokal	-	pembelian	2008		Baik	19
	10	Meja Komputer	-	-	Pembelian	2016		Baik	1
	11	Meja Kerja	-	-	Pembelian	2015		Baik	1
	12	Meja Kerja	Informa / Montana MGR	Desk 2009 Right	Pembelian	2021		Baik	1
	13	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	Pembelian	2013		Baik	2
	14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	Pembelian	2017		Baik	5
	15	Meja Kerja Pejabat lain-	-	-	pembelian	2010		Baik	1
	16	Meja Kerja Pejabat lain-Tiger	-	-	Pembelian	2015	160x75x75cm	Baik	25
	17	Meja Kerja Pejabat lain- lain	-	-	Pembelian	2020		Baik	1
	18	Meja Rapat	-	-	Pembelian	2017		Baik	1
	19	Meja Rapat Pejabat lainnya	-	-	hibah	2004		Baik	22
	20	Meja Rapat Pejabat lainnya	-	-	pembelian	2005		Baik	18
	21	Meja Rapat Pejabat lainnya	-	-	pembelian	2008		Baik	22
	22	Meja Rapat Pejabat lainnya	Multiplex Finising HPL	-	Pembelian	2020		Baik	1

165

5	1	P.C Unit	Lenovo	-	Pembelian	2016		Baik	2
	2	P.C Unit	Asus	-	Pembelian	2017		Baik	2
	3	P.C Unit	HP / PC	-	Pembelian	2020		Baik	2
	4	P.C Unit	Asus PC / All-in-One Asus V222UAK-WA541T	-	Pembelian	2020		Baik	1
	5	P.C Unit	HP / HP 205	-	Pembelian	2021		Baik	3
	6	Lap Top	Apple3	-	Pembelian	2015		Baik	2
	7	Lap Top	Asus A455L	-	Pembelian	2015		Baik	2
	8	Lap Top	Apple	-	Pembelian	2015		Baik	1
	9	Lap Top	asus	-	Pembelian	2016		Baik	1
	10	Lap Top	Dell	-	Pembelian	2016		Baik	1
	11	Lap Top	Dell	-	Pembelian	2016		Baik	1
	12	Lap Top	hp	-	Pembelian	2017		Baik	4
	13	Lap Top	-	-	Pembelian	2017		Baik	1
	14	Lap Top	Asus	-	Pembelian	2017		Baik	1
	15	Lap Top	hp	-	Pembelian	2017		Baik	1
	16	Lap Top	Lenovo	-	Pembelian	2018		Baik	3
	17	Lap Top	Lenovo / ideapad 330	-	Pembelian	2019		Baik	1
	18	Lap Top	Asus UX365FA-EL70/ 2T CI W10 Royal Blue + only Sleeve	-	Pembelian	2020		Baik	3
	19	Lap Top	Asus Vivobook K403FA-EB301 T58960000 Asus / X415	-	Pembelian	2020		Baik	1
	20	Lap Top	LAPTOP Asus X415	-	Pembelian	2021		Baik	2
	21	Lap Top	Appel / Macbook M1	-	Pembelian	2021		Baik	1
	22	Lap Top	Lenovo / F0E8	-	Pembelian	2021		Baik	1
	23	Personal Komputer	-	-	Pembelian	2015		Baik	2
	24	Personal Komputer lainnya	lenovo	-	Pembelian	2015		Baik	7
	25	Peralatan Komputer lainnya	-	-	Pembelian	2020		Baik	1

									47
6	1	Camera Video	-	-	Pembelian	2016		Baik	2
	2	Camera Video	Canon	-	Pembelian	2016		Baik	1
	3	Camera Video	-	-	Pembelian	2017		Baik	1
	4	Tustel	-	-	pembelian	2010		Baik	1
	5	Tustel	-	-	Pembelian	2012		Baik	3
	6	Tustel	Sony	-	Pembelian	2014		Baik	1
	7	Tustel	Nikon / D7100	-	Pembelian	2014		Baik	1
	8	Tustel	Canon / EOS 80D	-	Pembelian	2019		Baik	1
	9	Tustel	CANON EOS 8000D	-	Pembelian	2020		Baik	1
	10	Kamera Digital	Sony A 6000	-	Pembelian	2020		Baik	1
									13
7	1	Lemari Besi/Metal	platinum	-	pembelian	2009		Baik	3
	2	Lemari Besi/Metal	Mobile File System 30 Compartment	-	Pembelian	2015		Baik	1
	3	Lemari Kayu	Olimpic	-	Pembelian	2016		Baik	1
	4	Lemari Kayu	-	-	Pembelian	2017		Baik	2
	5	Lemari Kayu	Olympic	-	Pembelian	2019		Baik	6
	6	Lemari Kayu	- / Lemari Arsip	-	Pembelian	2019		Baik	1
	7	Lemari Buku Untuk Arsip	-	-	Pembelian	2011		Baik	1
	8	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	-	pembelian	2010		Baik	2
	9	Lemari Buku Arsip	-	-	pembelian	2010		Baik	1
	10	Lemari Buku Arsip	lokal	-	Pembelian	2012		Baik	1
	11	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lion	-	Pembelian	2016		Baik	2
	12	Lemari Buku Arsip	-	-	Pembelian	2016		Baik	1
	13	Lemari Buku Arsip	Lion	-	Pembelian	2016		Baik	1
	14	Buffet Kayu	-	-	Pembelian	2020		Baik	1
	15	Filing Cabinet Besi	lokal	-	hibah	2004		Baik	6
	16	Filing Cabinet Besi	-	-	Pembelian	2012		Baik	5
	17	Filing Cabinet Besi	Lion	-	Pembelian	2017		Baik	1
									36
8	1	Televisi	Polytron	-	pembelian	2008		Baik	1
	2	Televisi	Polytron	-	Pembelian	2015		Baik	4
	3	Televisi	Polytron	-	Pembelian	2015		Baik	5
	4	Televisi	Polytron	-	Pembelian	2015		Baik	1
	5	Televisi	Polytron	-	Pembelian	2016		Baik	1
	6	Televisi	Polytron	-	Pembelian	2017		Baik	2
	7	Televisi	Polytron	-	Pembelian	2017		Baik	22
	8	Televisi	Samsung	-	Pembelian	2017		Baik	1
	9	Televisi	LG ThinQ A1	-	Pembelian	2020		Baik	2
	10	Televisi	LG ThinQ A1	-	Pembelian	2020		Baik	1
	11	TV Monitor	Sharp / Aquos	-	Pembelian	2021		Baik	1
									41
9	1	Dispenser	Miyako	-	Pembelian	2016		Baik	6
	2	Dispenser	Maspion	-	Pembelian	2017		Baik	2
	3	Dispenser	Miyako	-	Pembelian	2017		Baik	25
									33
10	1	Exhause Fan	Maspion	-	Pembelian	2016		Baik	5
	2	Exhause Fan	Maspion	-	Pembelian	2017		Baik	36
	3	Kipas Angin	Miyako	-	Pembelian	2016		Baik	2
	4	Kipas Angin	Miyako	-	Pembelian	2017		Baik	2
	5	Kipas Angin	Maspion	-	Pembelian	2017		Baik	50
									95
11	1	LCD Projector/Infocus	EPSON EB-S400 /	-	Pembelian	2020		Baik	1
	2	Layar Film/Projector	Acer	-	Pembelian	2015		Baik	2
	3	Layar Film/Projector	Hitachi	-	Pembelian	2017		Baik	2
									5

Taliwang , 31 Januari 2022

Sekretaris DPRD Kab. Sumbawa Barat

Ir. Irhas R Rayes, M.Si

NIP. 19651102 199003 1 011

### 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Menjelaskan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, dengan realisasi yang telah dicapai. Adapun tabel untuk gambaran kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dengan format sebagai berikut:

Tabel. 2.5. Gambaran Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	- Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	- 100 %	- 100 %	100
2.	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	- Realisasi Anggaran - Nilai SAKIP	- 100 % - BB	- 97 % - B	97 B
3.	Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-Undangan dan Humas	- Persentase Perda yang disepakati	- 100 %	- 100 %	100

1. Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah item Pelayanan Internal yang disediakan pada tahun 2021 untuk memenuhi semua kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terpenuhi 100 % sesuai dengan yang ditargetkan yakni 100%, sehingga jika dikalikan dengan 100% akan menghasilkan 100% sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran terpenuhinya pelayanan internal perangkat daerah terhadap DPRD.

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Jumlah Item Pelayanan Internal yang disediakan dibagi dengan Jumlah Item Pelayanan yang dibutuhkan dikali seratus.

Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah dengan indikator Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100% (100/100*100%)	100%	100%

2. Sasaran Meningkatnya pelayanan keuangan Perangkat Daerah dimana ditentukan oleh Nilai Realisasi Anggaran dan nilai SAKIP dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Realisasi Anggaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 98,76% dari target 100%. Realisasi Anggaran dari Sekretariat DPRD tidak mencapai 100% dikarenakan ada sisa anggaran dari berapa kegiatan yang menjadi sisa atau tidak habis terpakai sehingga dikembalikan ke kas daerah. Sedangkan untuk Nilai SAKIP Sekretariat DPRD adalah B dari target BB. Hal ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan dokumen SAKIP yang disusun dan menjadi bahan perbaikan di Tahun selanjutnya.

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Anggaran</li> <li>- Nilai SAKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besaran Realisasi Keuangan dibagi Besaran Anggaran dikali seratus</li> <li>- Katagori Nilai SAKIP</li> </ul>

Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayan Keuangan Perangkat Daerah indikator Realisasi Anggaran dan Nilai SAKIP pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	- Realisasi Anggaran - Nilai SAKIP	- 100% - B	- 100% - % - BB	- 98.76% - B - B	- 98.76% - % - B	- 100% - A	- 98.76% - B

3. Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas ditentukan oleh Persentase Perda yang disepakati dan mencapai niali 100 % sesuai dengan taeget di Renja dan Renstra. Hal ini tercapai karena sekretariat DPRD berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk kelancaran pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	- Persentase Perda yang disepakati	- Jumlah Perda yang di setujui dibagi Jumlah total Perda dan peraturan DPRD dikali seratus

Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas dengan indikator Persentase Perda yang disepakati pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Perda yang disepakati	100%	100%	100%	100% (100/100*100%)	100%	100%

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021 mencapai 98,76 % dikarenakan oleh perencanaan target yang ingin dicapai ditahun berjalan sesuai dengan perencanaan anggaran kegiatan sehingga hasil

yang didapatkan seimbang. Hal ini juga didasari oleh koordinasi semua subbagian dalam perencanaan target dan pagu anggaran sehingga pagu anggaran dipergunakan sesuai pada tempatnya yakni mengacu pada Renja dan Renstra tahun 2021.

Pengukuran Perbandingan Kinerja Tahun 2021-2026 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan penetapan kinerja tahunan yang telah di sepakati bersama dalam hal ini antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Bupati Sumbawa Barat. Pengukuran tersebut menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.6. Pengukuran Perbandingan Kinerja Sekretariat DPRD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	2025	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	- Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	- Realisasi Anggaran - Nilai SAKIP	92 % B	97 % B	97% B	97% B	97% B	97% B
3.	Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	- Persentase Perda disepakati	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Perbandingan Sasaran Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah Tahun 2016 dengan Tahun 2020 Capaian Kinerja dan rasionya sama yakni 100 %. Hal ini karena memang diharapkan untuk indikator tersebut realisasi dari tahun ke tahun tetap selaras yakni 100 %. Indikator pada sasaran ini memang diharapkan tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 5 tahun Renstra dan diharapkan pada tahun terakhir Renstra semua sasaran akan mencapai hasil 100 %.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah :

1. Selalu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai kecukupan pembagian Subsubbagian agar mampu melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang dibebankan pada setiap bagian.

3. Selalu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai ruang lingkup dan rentang kendali tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan Sub-subbagian.
4. Selalu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai sistem pengorganisasian yang lebih jelas mengenai penanggung jawab setiap kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Ketertiban Pelayanan internal adalah :

1. Kerja sama semua bagian/pihak
2. Memperbaiki sistem kerja untuk mencapai target kerja yang sudah tetapkan
3. Optimalisasi kerja terus ditingkatkan

Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sasaran adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dibebankan.
2. Kesertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat.
4. Perbandingan Sasaran Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah capaian kinerjanya mencapai 92 % baik pada tahun 2016 dan 97% di tahun 2017-2020. Pada Sasaran ini baik target dan realisasi sesuai dengan Renja dan Renstra tahun berjalan yakni 97% dan diharapakan pada 2021 akan mencapai 100 %.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah :

1. Selalu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai kecukupan pembagian Subsubbagian agar mampu melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang dibebankan pada setiap bagian.
2. Kerjasama yang baik di setiap masing-masing bagian dan Sub-subbagian.
3. Perencanaan yang terpadu.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatnya Ketertiban Pelayanan Keuangan adalah :

1. Kerja sama semua bagian/pihak
2. Memperbaiki sistem kerja untuk mencapai target kerja yang sudah tetapkan
3. Optimalisasi kerja terus ditingkatkan

Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sasaran adalah :

1. Ketidaktersedian Sarana dan Prasarana pendukung kinerja.
2. Kesertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat.
3. Pada Sasaran Meningkatkan Ketertiban Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas baik di tahun 2019 maupun di tahun 2020 telah mencapai 100 %. Hal ini karena berkaitan dengan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD sehingga hasil yang diharapkan pun harus memberikan pelayanan dan hasil yang maksimal yaitu 100 %.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah :

1. Selalu dilakukan evaluasi dan kajian mengenai kecukupan pembagian Subsubbagian agar mampu melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang dibebankan pada setiap bagian.
2. Kerjasama yang baik di setiap masing-masing bagian dan Sub-subbagian.
3. Pelayanan Maksimal
4. Perencanaan yang maksimal

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatnya Ketertiban Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas adalah :

1. Kerja sama semua bagian/pihak
2. Memperbaiki sistem kerja untuk mencapai target kerja yang sudah tetapkan
3. Optimalisasi kerja terus ditingkatkan

Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sasaran adalah :

1. Ketidaktersedian Sarana dan Prasarana pendukung kinerja.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD juga memiliki kinerja keuangan SKPD. Disini yang ditelaah adalah Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 3 (lima) tahun kebelakang mulai dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.7. Perbandingan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2020 dibawah ini.

**Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100%
10	Layanan Administrasi DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100%
11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100%
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100%
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100%
14	Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100%
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100%
16	Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% 100%

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan**

### **2.4.1. Peluang**

Peluang yang dapat membantu Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat adalah :

1. Terbukanya peluang Kerjasama dan Pendanaan yang sangat luas dengan seluruh stakeholders baik unsur pemerintah atau non pemerintah, baik pusat maupun daerah, baik dalam maupun luar negeri, untuk terlibat dalam rencana pembangunan daerah di segala bidang;
2. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tercermin dalam tuntutan dan aspirasi semakin beragam yang semuanya harus ditampung dan dipertimbangkan;
3. Sistem perencanaan yang memungkinkan Sekretariat DPRD berinisiatif dan menampung semua aspirasi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Kepemimpinan Kepala Daerah yang Visioner, berkomitmen, dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif dan responsif di Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Terjadinya hubungan yang harmonis dan koordinasi yang baik dengan masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga dengan para pemangku kepentingan [Stakeholders) sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
6. Adanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;

### **2.4.2. Tantangan**

1. Terjalinnya kerja sama antara seluruh stakeholders baik unsur pemerintah atau non-pemerintah, baik pusat maupun daerah, baik dalam maupun luar negeri dalam rencana pembangunan daerah di segala bidang;
2. Terbangunnya koordinasi dan pemahaman akan kebutuhan masyarakat secara responsif dan partisipatif yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Melaksanakan sinkronisasi dalam sistem perencanaan Sekretariat DPRD oleh tenaga yang profesional dengan pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari Dinas/Instansi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Kemampuan seluruh perangkat SKPD untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam rencana pembangunan daerah;
5. Adanya koordinasi yang baik dan menghilangkan ego sektoral antar SKPD Kabupaten;
6. Munculnya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
7. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut kualitas perencana yang berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada saat ini kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah terlaksana dengan baik. Namun dalam perkembangannya terdapat isu-isu strategis yang merupakan permasalahan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat beserta unit-unit kerja dibawahnya. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dan Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ini, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kualifikasi SDM tidak merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai dampak adanya zero growth menjadi negative growth dalam beberapa tahun ke depan pada penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) serta belum adanya Tenaga Legal Drafter yang mana hal ini akan menyebabkan berkurangnya kualitas kinerja lembaga pada pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Penyelesaian kinerja Sekretariat DPRD yang belum optimal sebagai akibat dari menurunnya jumlah kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD dan hal ini dapat berlanjut kepada menurunnya jumlah yang lebih signifikan akibat dari zero growth dalam penerimaan pegawai negeri sipil dalam beberapa tahun ke depan.
3. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan jejaring kerjasama yang di fasilitasi Sekretariat DPRD belum terintegrasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan.
4. Peran ganda yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lembaga yang melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus sebagai OPD yang berdiri sendiri di bawah Bupati Sumbawa Barat dimana kedua

lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda yaitu sebagai legislatif sebagai eksekutif akan menjadikan posisi Sekretariat DPRD DIY harus bisa menjadi mediator untuk menyesuaikan kepentingan kedua lembaga tersebut.

5. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan bahan acara tidak dapat diseragamkan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang terkait dengan Visi, Misi serta program Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berdasarkan RPJM Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

#### **3.2.1. Visi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 adalah rencana pelaksanaan tahap ke tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 dengan visinya adalah :

**“TERWUJUDNYA KSB BAIK BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. KSB Baik** adalah suatu daerah yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan prilaku penduduknya yang selaras antara pembangunan dunia dan akheratnya serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya dengan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.
- 2. Gotong royong** yang dalam bahasa tau tana samawa “basiru” merupakan kearifan lokal sebagai modal sosial yang telah mengakar dan terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Budaya gotong royong adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa

Barat. Semangat kolektivitas inilah yang menjadi piranti dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dan menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat gotong-royong, segala ide, nilai, dan pelaksanaan pembangunan tidak akan mampu ditransformasikan menjadi bentuk yang nyata.

### **3.2.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi pembangunan KSB BAIK, diperlukan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan yang selanjutnya disebut MISI. Misi membantu agar visi tergambaran lebih jelas, memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi tersebut. Oleh karena itu, pokok-pokok VISI di atas akan dijabarkan ke dalam 6 (enam) MISI sebagai berikut :

**a. KSB BAIK dalam akhlak dan daya saing sumberdaya manusia**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia daerah baik dari pengetahuan dan kesehatannya, maupun prilakunya. Sehingga manusia Sumbawa Barat yang baik tidak saja dilihat dari sisi tingkat pendidikannya ataupun tingkat kesehatan, tetapi juga prilaku kesehariannya mencerminkan akhlak yang baik.

**b. KSB BAIK dalam kemandirian sosial masyarakat**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat.

**c. KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan terintegrasi.

**d. KSB BAIK dalam kemandirian pangan**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan pokok masyarakat serta pengolahannya di dalam daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

**e. KSB BAIK dalam kemandirian ekonomi**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat melalui peningkatan sektor-sektor unggulan daerah.

**f. KSB BAIK dalam kemantapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur daerah untuk mendukung semua sektor ekonomi dan sosial masyarakat Sumbawa Barat. Misi ini juga diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat melalui penataan lingkungan baik dalam kewenangan daerah maupun di luar kewenangan daerah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan keenam Misi tersebut di atas, dalam lima tahun ke depan Pemerintah Daerah akan kembali melanjutkan pembangunan yang partisipatif dan responsif, mengedepankan kearifan lokal, musyawarah mufakat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan gotong royong demi terwujudnya Visi Daerah dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2006-2025, yaitu Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan pada Semua Aspek Kehidupan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

### **3.2.3. Sasaran**

Memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah dijabarkan diatas, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan masing-masing misi sebagai berikut :

**a. KSB BAIK dalam akhlak dan daya saing sumberdaya manusia**, ditetapkan tujuan Mewujudkan sumberdaya manusia Sumbawa Barat yang cerdas, sehat dan

berakhlak mulia dimana sasarannya meliputi (1) Meningkatnya sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter, (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan (3) Meningkatnya pembangunan mental spiritual masyarakat berbasis keluarga.

b. **KSB BAIK dalam kemandirian sosial masyarakat**, ditetapkan tujuan Mewujudkan kemandirian sosial masyarakat dimana sasarannya meliputi (1) Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat miskin, dan (2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin.

c. **KSB BAIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**, ditetapkan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dimana sasaran meliputi (1) Meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintah daerah, (2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan (3) Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas.

d. **KSB BAIK dalam kemandirian pangan**, ditetapkan tujuan Mewujudkan ketahanan pangan daerah dimana sasarannya meliputi (1) Meningkatnya ketersediaan pangan, dan (2) Meningkatnya komsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

e. **KSB BAIK dalam kemandirian ekonomi**, ditetapkan tujuan Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dimana sasarannya meliputi (1) Meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, industri dan perdagangan daerah, (2) Meningkatnya daya saing pariwisata daerah, (3) Meningkatnya kesempatan kerja, dan (4) Meningkatnya perkembangan desa.

f. **KSB BAIK dalam kemantapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup**, ditetapkan tujuan sebagai berikut :

Mewujudkan kemantapan infrastruktur daerah dimana sasarannya meliputi (1) Meningkatnya kemantapan infrastruktur kebinamargaan, (2) Meningkatnya kemantapan infrastruktur sumberdaya air, dan (3) Meningkatnya penataan perumahan dan kawasan pemukiman.

Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dimana sasarannya meliputi (1) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan, dan (2) Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau.

### **3.3. Penentuan Isu-isu strategis**

Isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan fasilitasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya , meliputi:

1. Diperlukannya peningkatan kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Perda dan Perda Inisiatif serta peningkatkan fungsi kepustakaan dan kearsipan.
2. Diperlukannya peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta tersusunnya dokumentasi kegiatan persidangan yang memadahi dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat kelengkapan dewan.
3. Diperlukannya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian.
4. Diperlukannya peningkatan pelayanan dan fasilitasi penyusunan program dan Keuangan DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan program, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Diperlukannya peningkatan fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.
6. Diperlukan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat DPRD belum memberikan pelayanan yang andal dan professional.

DPRD sebagai lembaga politik sekaligus lembaga perwakilan rakyat daerah selalu menjadi perhatian bagi publik. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan peran yang harus dilakoni oleh DPRD begitu tinggi, baik yang bersifat kelembagaan

maupun yang bersifat orang per orang. Karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan ini, kinerja yang harus ditampilkan harus mampu menjawab ekspektasi dan tuntutan peran dari masyarakat, tidak saja oleh anggota DPRD namun juga oleh institusi pendukungnya yaitu Sekretariat DPRD. Dalam memenuhi ekspektasi dan tuntutan peran ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat harus mampu memperlihatkan kinerja yang optimal sebagai unsur pelayanan untuk kelancaran kegiatan DPRD, mempersiapkan Persidangan, menyiapkan Produk Perundang-Undangan, kegiatan Kehumasan, Pelayanan Umum untuk kelancaran DPRD dan melaksanakan kegiatan Administrasi dan Keuangan. Karena itu seluruh bagian dan sub-sub bagian dalam organisasi Sekretariat DPRD harus mampu berperan optimal dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya tersebut.

7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta pemanfaatan Teknologi Informasi yang cepat dan modern.

Dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD kabupaten Sumbawa Barat, saat ini Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat telah berupaya meningkatkan daya dukung DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Sejumlah fasilitas pendukung harus disiapkan dan dikelola secara efisien untuk dapat memenuhi kebutuhan kerja dari para anggota DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama sebagai wakil rakyat. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ini diharapkan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD dapat meningkat. Diharapkan dengan optimalisasi daya dukung ini ekspektasi masyarakat terhadap peran yang seharusnya diemban oleh setiap anggota DPRD sebagai para wakil rakyat dapat terpenuhi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Tujuan**

Tujuan berkaitan dengan pandangan ke depan, kemana instansi pemerintahan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara pasti dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 adalah :

**“MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KEPADA  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD “**

Makna pokok yang terkandung didalam Tujuan di atas adalah :

*Aktualisasi Pelayanan Berkualitas*, menggambarkan bahwa dalam mendukung Tri Fungsi DPRD, institusi ini mampu memberikan pelayanan yang komprehensif dalam satu proses kegiatan yang paripurna dari mulai perencanaan sampai ke hasil akhir laporan dan evaluasi. Hal ini sekaligus menghilangkan image bahwa selama ini Sekretariat DPRD hanya berikut seputar pelayanan fisik saja.

Sekretariat DPRD sebagai Institusi Birokrat mampu secara administratif dalam aplikasi pelayanan kepada DPRD, namun secara operasional mampu dalam “Sense of Politic”. Hal ini menyangkut keberadaan Sekretariat DPRD yang merupakan bagian dari perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

#### **4.2. Sasaran**

Dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Misi sebagai berikut :

**1. MENINGKATNYA PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH.**

Misi untuk meningkatnya pelayanan internal Perangkat Daerah merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal untuk pimpinan dan anggota DPRD

dalam bidang adminitrasi dan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan kinerja DPRD.

## **2. MENINGKATNYA PELAYANAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.**

Misi untuk meningkatnya pelayanan Keuangan Perangkat Daerah merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal untuk pimpinan dan anggota DPRD dalam bidang adminitrasi keuangan, pembinaan dan pelayanan pengurusan serta pengelolaan keuangan DPRD, perencanaan anggaran dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan DPRD dalam mendukung peningkatan kinerja DPRD.

## **3. MENINGKATNYA PELAYANAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-**

**UNDANGAN DAN HUMAS.** Misi untuk meningkatnya pelayanan persidangan, perundang-undangan dan humas merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelayanan rapat untuk menunjang kinerja DPRD.

**Tabel 4.1. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	75	80	85	87	90	95
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP	BB	A	A	A	A	A

	Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang- undangan dan Humas	Persentase Perda yang disepakati	100	100	100	100	100	100
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussedmanagement).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan rangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode RENSTRA, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD adalah strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD menunjukkan bagaimana cara Sekretariat DPRD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SEKRETARIAT DPRD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan dan subkegiatan SEKRETARIAT DPRD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SEKRETARIAT DPRD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SEKRETARIAT DPRD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan Strategis tidak saja

mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan Arah kebijakan yang dipilih SEKRETARIAT DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat.

**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD**

VISI	Terwujudnya KSB BAIK Berlandaskan Gotong Royong		
MISI	KSB BAIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, administrasi yang lengkap dan kualitas pelayanan yang maksimal baik sarana dan prasarana	1.Meningkatkan budaya integritas dan budaya kerja aparatur 2.Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur 3. Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan 4.Melaksanakan penetaan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 5. Menerapkan system reward dan punishment terhadap kinerja aparatur 6. Meningkatkan kualitas penyedian dan kelengkapan sarana dan prasarana
	2. Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Penyusunan perencanaan yang terpadu dan terukur dan terlaksananya laporan keuangan tepat waktu.	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 2. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan system perencanaan dan keuangan 3. Koordinasi dan Konsultasi terkait system perencanaan yang ideal dan maksimal
	3. Meningkatnya	1.Peningkatan kualitas	1.Meningkatkan kinerja

	Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas	pelayanan Rapat-rapat DPRD  2. Peningkatan korelasi positif dan komunikasi yang baik pada sekretariat sebagai institusi yang mendukung pelaksanaan TRIFUNGSI DPRD	pelayanan dalam memfasilitasi agenda kerja dan rapat-rapat DPRD
--	---	---	---

## **BAB VI**

### **RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kriteria Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja perangkat Daerah Penanaman Jawa Barat	Lokasi						
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kerja pada Akhir Renstra					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Realisasi Anggaran	98%	6,514,455,280	80%	85%	87%	90%	95%	90%	95%	99%	99%	99%	99%	99%	Setwan Sumbawa Barat	
	PROGRAM PENUNJANG TRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Realisasi Anggaran	98%	1,551,778,500	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Setwan Sumbawa Barat	
			Perencanaan, Pengawasaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	334,957,830	100%	435,445,179	100%	566,078,733	100%	735,902,353	100%	883,082,823	100%	1,059,699,388	100%	1,059,699,388	Setwan Sumbawa Barat	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100%	176,729,000	100%	229,747,700	100%	298,672,910	100%	388,273,613	100%	465,928,336	100%	559,114,003	100%	559,114,003	Setwan Sumbawa Barat	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	100%	16,685,000	100%	21,690,500	100%	28,197,650	100%	36,656,945	100%	43,988,334	100%	52,786,001	100%	52,786,001	Setwan Sumbawa Barat	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	38,990,000	100%	50,687,000	100%	65,893,100	100%	85,661,030	100%	102,793,236	100%	123,351,883	100%	123,351,883	Setwan Sumbawa Barat	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	100%	20,692,250	100%	26,899,925	100%	34,969,903	100%	45,460,873	100%	54,553,048	100%	65,463,657	100%	65,463,657	Setwan Sumbawa Barat	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	34,425,580	100%	44,753,254	100%	58,179,230	100%	75,632,999	100%	90,759,599	100%	108,911,519	100%	108,911,519	Setwan Sumbawa Barat	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang disusun	100%	47,436,000	100%	61,666,800	100%	80,166,840	100%	104,216,892	100%	125,060,270	100%	150,072,324	100%	150,072,324	Setwan Sumbawa Barat	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	182,563,000	100%	237,331,900	100%	308,531,470	100%	401,090,911	100%	481,309,093	100%	577,570,912	100%	577,570,912	Setwan Sumbawa Barat	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	32,430,000	100%	42,159,000	100%	54,806,700	100%	71,248,710	100%	85,498,452	100%	102,598,142	100%	102,598,142	Setwan Sumbawa Barat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Kegiatan (Output) Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Daerah Penanggung jawab						
					2021		2022		2023		2024		Kondisi Kerja pada Akhir Renstra						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi keuangan SKPD	100%	45.470.000	100%	59.111.000	100%	76.844.300	100%	99.897.590	100%	119.877.108	100%	143.852.530	Setwan	Sumbawa Barat	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	45.713.000	100%	59.426.900	100%	77.254.970	100%	100.431.461	100%	120.517.753	100%	144.621.304	Setwan	Sumbawa Barat	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	100%	27.700.000	100%	36.010.000	100%	46.813.000	100%	60.856.900	100%	73.028.280	100%	87.633.936	Setwan	Sumbawa Barat	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Fisik Keuangan	100%	31.250.000	100%	40.625.000	100%	52.812.500	100%	68.656.250	100%	82.387.500	100%	98.865.000	Setwan	Sumbawa Barat	
			Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	Setwan	Sumbawa Barat	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan dokumen administrasi barang milik daerah Tepat Waktu	100%	90.459.500	100%	117.597.350	100%	152.876.555	100%	198.739.522	100%	238.487.426	100%	286.184.911	Setwan	Sumbawa Barat	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	90.459.500	100%	117.597.350	100%	152.876.555	100%	198.739.522	100%	238.487.426	100%	286.184.911	Setwan	Sumbawa Barat	
			Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Tepat Waktu	100%	120.426.000	100%	156.553.800	100%	203.519.940	100%	264.575.922	100%	317.491.106	100%	380.989.328	Setwan	Sumbawa Barat	
			Perdecaan dan Pengelolaan Administrasi Kepergawainan	Jumlah Laporan Administrasi Kepergawainan	100%	53.640.000	100%	69.732.000	100%	90.651.600	100%	117.847.080	100%	141.416.496	100%	169.699.795	Setwan	Sumbawa Barat	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	100%	66.786.000	100%	86.821.800	100%	112.868.340	100%	146.728.842	100%	176.074.610	100%	211.289.532	Setwan	Sumbawa Barat	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	100%	158.825.950	100%	206.473.735	100%	268.415.856	100%	348.940.612	100%	418.728.735	100%	502.474.481	Setwan	Sumbawa Barat	
			Periyudian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	100%	113.023.000	100%	146.929.900	100%	191.008.870	100%	248.311.531	100%	297.973.837	100%	357.568.605	Setwan	Sumbawa Barat	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bundel Arsip Yang diatau	100%	45.802.950	100%	59.543.835	100%	77.406.986	100%	100.629.081	100%	120.754.897	100%	144.905.877	Setwan	Sumbawa Barat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Kegiatan (Output) Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab				
					2021		2022		2023		2024		2025						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan barang penunjang pelayanan internal SKPD	574,540,000	100%	746,902,000	100%	970,972,600	100%	1,262,264,380	100%	1,514,717,256	100%	1,817,660,707	100%	Setwan	Sumbawa Barat	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan	100%	408,907,000	100%	531,579,100	100%	691,052,830	100%	898,368,679	100%	1,078,042,415	100%	1,293,650,898	100%	Setwan	Sumbawa Barat
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	165,633,000	100%	215,322,900	100%	279,919,770	100%	363,895,701	100%	436,674,841	100%	524,009,809	100%	Setwan	Sumbawa Barat
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan internal SKPD	100%	2,407,506,000	100%	3,129,757,800	100%	4,068,685,140	100%	5,289,290,682	100%	6,347,148,818	100%	7,616,578,582	100%	Setwan	Sumbawa Barat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Jasa yang disediakan	100%	347,840,000	100%	452,192,000	100%	587,849,600	100%	764,204,480	100%	917,045,376	100%	1,100,454,451	100%	Setwan	Sumbawa Barat
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Tenggara Administrasi Pelayanan Umum Kantor	100%	2,059,666,000	100%	2,677,565,800	100%	3,480,835,540	100%	4,525,086,202	100%	5,430,103,442	100%	6,516,124,131	100%	Setwan	Sumbawa Barat
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kelancaran pemeliharaan barang milik SKPD	100%	1,012,628,000	100%	1,316,416,400	100%	1,711,341,320	100%	2,224,743,716	100%	2,669,692,459	100%	3,203,630,951	100%	Setwan	Sumbawa Barat
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	100%	247,282,000	100%	321,466,600	100%	417,906,580	100%	543,278,554	100%	651,934,265	100%	782,321,118	100%	Setwan	Sumbawa Barat
			Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	380,618,000	100%	494,803,400	100%	643,244,420	100%	836,217,746	100%	1,003,461,295	100%	1,204,153,554	100%	Setwan	Sumbawa Barat
			Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah sarpras gedung kantor yang dipelihara	100%	184,665,000	100%	240,064,500	100%	312,083,850	100%	405,709,005	100%	486,850,806	100%	584,220,967	100%	Setwan	Sumbawa Barat
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan dan Kesejahteraan	100%	380,625,000	100%	494,812,500	100%	643,256,250	100%	886,233,125	100%	1,063,479,750	100%	1,276,175,700	100%	Setwan	Sumbawa Barat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung jawab				
					2021			2022			2023			2024					
					Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembahasan KUA dan PPAS (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	100%	82,500,000	100%	107,250,000	100%	139,425,000	100%	181,252,500	100%	217,503,000	100%	261,003,600	Setwan	Sumbawa Barat	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah rapat pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	100%	82,500,000	100%	107,250,000	100%	139,425,000	100%	181,252,500	100%	217,503,000	100%	261,003,600	Setwan	Sumbawa Barat	
			Pembahasan APBD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah rapat pembahasan APBD	100%	193,000,000	100%	250,900,000	100%	326,170,000	100%	424,021,000	100%	508,825,200	100%	610,590,240	Setwan	Sumbawa Barat	
			Pembahasan APBD Perubahan (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah rapat pembahasan APBD Perubahan	100%	193,000,000	100%	250,900,000	100%	326,170,000	100%	424,021,000	100%	508,825,200	100%	610,590,240	Setwan	Sumbawa Barat	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah rapat pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100%	193,000,000	100%	250,900,000	100%	326,170,000	100%	424,021,000	100%	508,825,200	100%	610,590,240	Setwan	Sumbawa Barat	
			Percentase Pengawasan urusan pemerintahan yang ditindaklanjuti	Percentase rekomendasi hasil pengawasan urusan pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	371,000,000	100%	482,300,000	100%	626,990,000	100%	815,087,000	100%	978,104,400	100%	1,173,725,280	Setwan	Sumbawa Barat	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan yang dilakukan	100%	371,000,000	100%	482,300,000	100%	626,990,000	100%	815,087,000	100%	978,104,400	100%	1,173,725,280	Setwan	Sumbawa Barat	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Percentase anggota DPRD yang mendapatkan kapasitas	100%	2,398,821,000	100%	3,118,467,300	100%	4,054,007,490	100%	5,770,209,737	100%	6,924,251,684	100%	8,309,102,021	Setwan	Sumbawa Barat	
			Bimbingan Teknis DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah peserta bimtek DPRD	100%	975,000,000	100%	1,267,500,000	100%	1,647,750,000	100%	2,142,075,000	100%	2,570,490,000	100%	3,084,588,000	Setwan	Sumbawa Barat	
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah publikasi dan dokumentasi dewan	100%	850,000,000	100%	1,105,000,000	100%	1,436,500,000	100%	1,867,450,000	100%	2,240,940,000	100%	2,689,128,000	Setwan	Sumbawa Barat	
			Penyelidikan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Tenaga Ahli DPRD	100%	272,000,000	100%	353,600,000	100%	459,680,000	100%	597,584,000	100%	717,100,800	100%	860,520,960	Setwan	Sumbawa Barat	
			Orientasi DPRD	Jumlah peserta orientasi DPRD									100%	500,000,000					
			Periyedikan Tenaga Ahli Fraksi (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	100%	176,821,000	100%	229,867,300	100%	298,827,490	100%	388,475,737	100%	466,170,884	100%	559,405,061	Setwan	Sumbawa Barat	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah pengaduan masyarakat/organisasi	100%	100,000,000	100%	130,000,000	100%	169,000,000	100%	219,700,000	100%	263,640,000	100%	316,368,000	Setwan	Sumbawa Barat	
			Penyusunan Program Kerja DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah dokumen program kerja DPRD	100%	25,000,000	100%	32,500,000	100%	42,250,000	100%	54,925,000	100%	65,910,000	100%	79,092,000	Setwan	Sumbawa Barat	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses	100%	6,070,716,500	100%	7,891,931,450	100%	10,259,510,885	100%	13,337,364,151	100%	16,004,836,981	100%	19,205,804,377	Setwan	Sumbawa Barat	
			Kunjungan Kerja dalam Daerah (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	50,000,000	100%	65,000,000	100%	84,500,000	100%	109,850,000	100%	131,820,000	100%	153,184,000	Setwan	Sumbawa Barat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab				
					2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kerja pada Akhir Renstra				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	100%	20.716,500	100%	26.931,450	100%	35.010,885	100%	45.514,151	100%	54.616,981	100%	65.540,377	Setwan Sumbawa Barat		
				Jumlah reses yang dilaksanakan (SEKRETARIAT DPRD)	100%	6.000.000,000	100%	7.800.000,000	100%	10.140.000.000	100%	13.182.000.000	100%	15.818.400.000	100%	18.982.080.000	Setwan Sumbawa Barat		
				Percentase tugas pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	100%	9.954.824,000	100%	12.941.271,200	100%	16.823.652,560	100%	21.870.748,328	100%	26.244.897,994	100%	31.493.877,592	Setwan Sumbawa Barat		
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	100%	9.939.824,000	100%	12.921.771,200	100%	16.798.302,560	100%	21.837.793,328	100%	26.205.351,994	100%	31.446.422,392	Setwan Sumbawa Barat		
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	100%	15.000.000	100%	19.500.000	100%	25.350.000	100%	32.955.000	100%	39.546.000	100%	47.455.200	Setwan Sumbawa Barat		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada Tabel 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SEKRETARIAT DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Tingkat Pemenuhan pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP	B	BB	A	A	A	A	A
3.	Persentase Perda yang disepakati	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sekretariat DPRD dalam merencanakan anggaran tahun berjalan tidak saja memenuhi keinginan dan kemauan berbagai pihak yang berkepentingan, namun juga menggunakan laporan evaluasi dan monitoring dan perkembangan tahun-tahun DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mulai bekerja. Hal ini perlu dipahami dan di mengerti oleh perencana anggaran dalam penyusunan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat pada pengusulan-

pengusulan anggaran tidak hanya sekedar menerima semua usulan anggaran namun juga perlu menggunakan evaluasi dan monitoring serta LKjIP dan laporan kinerja keuangan pada tahun-tahun anggaran berjalan.

Selain beberapa hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun renstra, diselaraskan dengan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD yang menjadi fasilitator dan dukungan kepada DPRD maka indikator kinerja utama juga dilakukan penyesuaian dengan perubahan indikator dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat 2021-2026.

Selanjutnya dalam merencanakan anggaran pada RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat periode tahun 2021 s/d 2026, usulan-usulan kegiatan dan pendanaan dapat direncanakan dengan baik dan dengan melihat tahun-tahun kinerja DPRD dan tahun politik yang sedang berjalan sehingga berdasarkan laporan keuangan, laporan monitoring dan evaluasi Sekretariat DPRD diharapkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan secara bertahap dapat dicapai 100% sampai tahun anggaran 2022.

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dalam pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sumbawa Barat.

Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat DPRD ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat DPRD.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat DPRD serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Sekretariat DPRD.

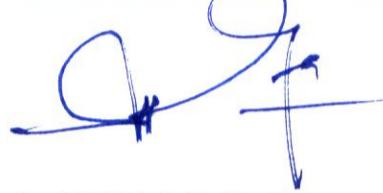
Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dan atau target kinerja sasaran Sekretariat DPRD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD harus ditingkatkan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian Kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD ini.

Taliwang, 24 September 2021

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Sumbawa Barat,



**Ir. IRHAS R.RAYES, M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19651102 199003 1 011

## **TUJUAN**

## **BAGIAN UMUM**

## **Sasaran : MENINGKATNYA PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH**

INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Tingkat Pemenuhan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Jumlah Item Pelayanan Internal Yang di Sediakan dibagi dengan Jumlah Item Pelayanan yang di Butuhkan dikali Seratus	%	100	4,209,869,190	100	4,630,856,109	100	5,093,941,720	100	5,603,335,892	100	6,163,669,481	100	6,780,036,429

## **SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN dan TATA USAHA**

## Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase pemenuhan dokumen administrasi barang milik daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah kebutuhan dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100	%	100	32,976,250	100	36,273,875	100	39,901,263	100	43,891,389	100	48,280,528	100	53,108,580

**Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Laporan	4	32,976,250	4	36,273,875	4	39,901,263	4	43,891,389	4	48,280,528	4	53,108,580

## Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Tepat Waktu	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah kebutuhan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah dikali 100	%	100	56,338,000	100	56,338,000	100	58,916,300	100	61,752,430	100	64,872,173	100	68,303,890
---	--	---	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian		Laporan	4	25,783,000	4	25,783,000	4	28,361,300	4	31,197,430	4	34,317,173	4	37,748,890

**Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

## Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang tersedia dibagi dengan Kebutuhan Perangkat Daerah	%	100	17,907,000	100	20,000,000	100	22,000,000	100	23,000,000	100	24,000,000	100	25,000,000

Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah Bundel Arsip Yang ditata		Bundel	100	17,907,000	100	20,000,000	100	22,000,000	100	23,000,000	100	24,000,000	100	25,000,000

## Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Jumlah kebutuhan penunjang yang tersedia dibagi dengan kebutuhan penunjang pada Perangkat Daerah dikalikan 100	%	100	1,659,049,570	100	1,700,000,000	100	173,200,000	100	173,200,000	100	173,200,000	100	173,200,000

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Tenaga Administrasi Pelayanan umum Kantor		Orang	111	1,659,049,570	111	1,700,000,000	111	173,200,000	111	173,200,000	111	173,200,000	111	173,200,000

**Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan kesejahteraan DPRD dibagi Jumlah total kebutuhan dikali seratus	%	100	349,975,750	100	399,975,750	100	399,975,750	100	850,000,000	100	399,975,750	100	399,975,750

Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas pakaian dinas dan atribut		org	25	349,975,750	25	349,975,750	25	349,975,750	25	800,000,000	25	349,975,750	25	349,975,750
--	--	-----	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------

**Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up DPRD**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Medical Checkup		kali	0		2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000

**Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD**

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase administrasi pimpinan dan anggota DPRD yang dipenuhi sesuai standar pelayanan	Jumlah Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dipenuhi dibagi Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD dikali seratus	%	100	37,191,000	100	37,809,000	100	38,809,000	100	39,809,000	100	41,309,000	100	42,809,000

**Subkegiatan : Penyelenggaraan Aministrasi Keanggotaan DPRD**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah dokumen administrasi DPRD		dok	25	17,809,000	25	17,809,000	25	17,809,000	25	17,809,000	25	17,809,000	25	17,809,000

**Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah fraksi DPRD yang difasilitasi		fraksi	4	19,382,000	4	20,000,000	4	21,000,000	4	22,000,000	100	23,500,000	4	25,000,000

**Program : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dibagi jumlah anggota dprd dikali seratus	Skor	100	72,907,500	100	72,907,500	100	72,907,500	100	572,907,500	100	72,907,500	100	72,907,500

**Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD**

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Persentase anggota DPRD yang mendapatkan Orientasi	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah seluruh anggota DPRD dikali seratus	org	0	72,907,500	0	72,907,500	0	72,907,500	25	572,907,500	0	72,907,500	0	72,907,500

**Subkegiatan : Orientasi DPRD**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah peserta orientasi DPRD		org							25	500,000,000				

## **SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA**

## Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase kelancaran pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang tersedia dibagi dengan Kebutuhan Perangkat Daerah	%	100	109,956,920	100	115,000,000	100	120,000,000	100	125,000,000	100	130,000,000	100	150,000,000

Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bngunan Kantor

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		Unit	10	109,956,920	10	115,000,000	10	120,000,000	10	125,000,000	10	130,000,000	10	150,000,000

## Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan penunjang Pemerintahan Daerah

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
persentase pemenuhan barang penunjang pelayanan internal SKPD	Jumlah kebutuhan penunjang yang tersedia dibagi dengan kebutuhan penunjang pada Perangkat Daerah dikali 100	%	100	228,034,000	100	250,837,400	100	275,921,140	100	303,513,254	100	333,864,579	100	367,251,037

**Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan		Unit	10	114,916,000	10	126,407,600	10	139,048,360	10	152,953,196	10	168,248,516	10	185,073,367

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
jumlah sarpras pendukung gedung kantor yang dijadakan		Unit	1	113,118,000	1	124,429,800	1	136,872,780	1	150,560,058	1	165,616,064	1	182,177,670

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	Rigatan : Penyediaan Jasa Pendidikan Urusan Pemerintahan Daerah											
			2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
persentase pemenuhan jasa penunjang urusan internal SKPD	Jumlah kebutuhanjasa penunjang yang tersedia dibagi dengan kebutuhan jasa penunjang pada Perangkat Daerah dikali 100	%	100	241,264,000	100	265,390,400	100	291,929,440	100	321,122,384	100	353,234,622	100	388,558,085

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah Jasa yang disediakan		Unit	3	241,264,000	3	265,390,400	3	291,929,440	3	321,122,384	3	353,234,622	3	388,558,085

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

persentase kelancaran pemeliharaan barang milik SKPD	Jumlah barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dibagi jumlah barang milik daerah pada Perangkat Daerah dikali 100	%	100	532,944,200	100	586,238,620	100	644,862,482	100	709,348,730	100	780,283,603	100	858,311,964
<b>Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		Unit	50	279,660,200	50	307,626,220	50	338,388,842	50	372,227,726	50	409,450,499	50	450,395,549
<b>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Unit	1	89,903,000	1	98,893,300	1	108,782,630	1	119,660,893	1	131,626,982	1	144,789,681
<b>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah sarpras gedung kantor yang dipelihara		Unit	30	121,723,000	30	133,895,300	30	147,284,830	30	162,013,313	30	178,214,644	30	196,036,109
<b>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah sarpras pendukung gedung kantor yang dipelihara		Unit	2	41,658,000	2	45,823,800	2	50,406,180	2	55,446,798	2	60,991,478	2	67,090,626
<b>Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD</b>														
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Persentase administrasi pimpinan dan anggota DPRD yang dipenuhi sesuai standar pelayanan	Jumlah Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dipenuhi dibagi Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD dikali seratus	%	100	871,325,000	100	958,457,500	100	958,457,500	100	1,054,303,250	100	958,457,500	100	958,457,500
<b>Sub Kegiatan : Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah rapat DPRD yang difasilitasi		kali	310	871,325,000	310	958,457,500	310	958,457,500	310	1,054,303,250	310	958,457,500	310	958,457,500

## BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

### Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah

INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Realisasi Anggaran	Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran dikali 100	%	100	20,849,364,532	100	21,474,728,382	100	22,162,628,617	100	22,919,318,876	100	23,751,678,160	100	24,667,273,373
Nilai SAKIP	Kategori Nilai SAKIP	Skor	BB		A		A		A		A		A	

## SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

### Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Inspektorat	Skor	BB	207,000,000	A	227,700,000	A	250,470,000	A	275,517,000	A	303,068,700	A	333,375,570

Realisasi Anggaran	Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran dikali 100	%												
<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>														
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Persentase Pemenuhan dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun dibagi dengan jumlah kebutuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD dikali 100	%	TARGET	Rp.										
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	100	207,000,000	100	227,700,000	100	250,470,000	100	275,517,000	100	303,068,700	100	333,375,570	
<b>Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearh</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	105,000,000	6	115,500,000	6	127,050,000	6	139,755,000	6	153,730,500	6	169,103,550	
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	17,000,000	1	18,700,000	1	20,570,000	1	22,627,000	1	24,889,700	1	27,378,670	
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	17,000,000	1	18,700,000	1	20,570,000	1	22,627,000	1	24,889,700	1	24,889,700	
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	Dokumen	1	21,000,000	1	23,100,000	1	25,410,000	1	27,951,000	1	30,746,100	1	33,820,710	
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN		2021		2022		2023		2024		2025		2026
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	21,000,000	1	23,100,000	1	25,410,000	1	27,951,000	1	30,746,100	1	30,746,100	

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025			
			TARGET	Rp.										
Jumlah Dokumen LKJiP yang disusun		Dokumen	1	26,000,000	1	28,600,000	1	31,460,000	1	34,606,000	1	38,066,600	1	41,873,260
Program : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase penuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dibagi jumlah anggota dprd dikali seratus	%	100	5,971,554,000	100	6,568,709,400	100	7,225,580,340	100	7,948,138,374	100	8,742,952,211	100	9,617,247,433
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD														
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah seluruh anggota DPRD dikali seratus	%	100	23,000,000	100	25,300,000	100	27,830,000	100	30,613,000	100	33,674,300	100	37,041,730
Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja DPRD														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah dokumen program kerja DPRD		Dokumen	1	23,000,000	1	25,300,000	1	27,830,000	1	30,613,000	1	33,674,300	1	37,041,730
Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat														
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses	Jumlah peserta reses yang berpartisipasi dibagi jumlah target peserta dikali seratus	%	100	5,938,698,000	100	6,532,567,800	100	7,185,824,580	100	7,904,407,038	100	8,694,847,742	100	9,564,332,516
Sub Kegiatan : Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD		Dokumen	3	20,716,500	3	22,788,150	3	25,066,965	3	27,573,662	3	30,331,028	3	33,364,130
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah reses yang dilaksanakan		Kali	3	5,917,981,500	3	6,509,779,650	3	7,160,757,615	3	7,876,833,377	3	8,664,516,714	3	9,530,968,386
Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD														
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase tugas pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Jumlah tugas yang difasilitasi dibagi jumlah tugas yang dilaksanakan dikali seratus	%	100	9,856,000	100	10,841,600	100	11,925,760	100	13,118,336	100	14,430,170	100	15,873,187

Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Jumlah laporan kinerja pimpinan DPRD		Dokumen	1	9,856,000	1	10,841,600	1	11,925,760	1	13,118,336	1	14,430,170	1	15,873,187

### SUBBAGIAN PELAPORAN DAN KEUANGAN

#### Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Realisasi Anggaran	Besaran realisasi keuangan dibagi besaran anggaran dikali 100	%	97	14,670,810,532	98	14,678,318,982	98	14,686,578,277	98	14,695,663,502	98	14,705,657,248	98	14,716,650,370
Nilai SAKIP	Katageri Nilai SAKIP	Skor	BB		A		A		A		A		A	
<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase pemenuhan dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen keuangan perangkat daerah dibagi dengan jumlah kebutuhan dokumen keuangan Perangkat Daerah dikali 100	%	100	14,670,810,532	100	14,678,318,982	100	14,686,578,277	100	14,695,663,502	100	14,705,657,248	100	14,716,650,370

#### Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN		Laporan	12	14,595,726,032	12	14,595,726,032	12	14,595,726,032	12	14,595,726,032	12	14,595,726,032	12	14,595,726,032

#### Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah laporan verifikasi keuangan SKPD		Laporan	4	22,970,000	4	25,267,000	4	27,793,700	4	30,573,070	4	33,630,377	4	36,993,415

#### Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Laporan	1	17,364,500	1	19,100,950	1	21,011,045	1	23,112,150	1	25,423,364	1	27,965,701

#### Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah laporan keuangan akhir tahun		Laporan	1	17,885,000	1	19,673,500	1	21,640,850	1	23,804,935	1	26,185,429	1	28,803,971

**Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah Laporan Fisik Keuangan		Laporan	12	16,865,000	12	18,551,500	12	20,406,650	12	22,447,315	12	24,692,047	12	27,161,251

**Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan kesejahteraan DPRD dibagi Jumlah total kebutuhan dikali seratus	%	100	14,500,000,000	100	26,276,717,128	100	27,454,388,841	100	30,199,827,725	100	31,624,810,497	100	33,192,291,547

**Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan DPRD		Laporan	12	14,500,000,000	12	14,500,000,000	12	14,500,000,000	12	15,950,000,000	12	15,950,000,000	12	15,950,000,000

**Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Persidangan, Perundang-undangan dan Humas**

INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2025	
			TARGET	Rp.										
Persentase Perda yang disepakati	Jumlah Perda yang di setujui dibagi jumlah total Perda dan peraturan DPRD dikali seratus	Skor	100	10,706,106,480	100	11,776,717,128	100	12,954,388,841	100	14,249,827,725	100	15,674,810,497	100	17,242,291,547

**SUBBAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH****Program : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dibagi jumlah anggota dprd dikali seratus	%	100	9,431,615,980	100	10,374,777,578	100	11,412,255,336	100	12,553,480,869	100	13,808,828,956	100	15,189,711,852

**Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran**

INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase kebijakan anggaran yang dibahas sesuai tata tertib	Jumlah kebijakan anggaran yang dibahas dibagi jumlah kebijakan anggaran dikali seratus	%	100	450,701,500	100	495,771,650	100	545,348,815	100	599,883,697	100	659,872,066	100	725,859,273

**Sub Kegiatan : Pembahasan KUA dan PPAS**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS		Kali	44	40,820,000	44	44,902,000	44	49,392,200	44	54,331,420	44	59,764,562	44	65,741,018

**Sub Kegiatan : Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah rapat pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan		Kali	44	40,695,000	44	44,764,500	44	49,240,950	44	54,165,045	44	59,581,550	44	65,539,704

**Sub Kegiatan : Pembahasan APBD**

INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah rapat pembahasan APBD		Kali	44	104,721,500	44	115,193,650	44	126,713,015	44	139,384,317	44	153,322,748	44	168,655,023

**Sub Kegiatan : Pembahasan APBD Perubahan**



Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat														
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses	Jumlah peserta reses yang berpartisipasi dibagi jumlah target peserta dikali seratus	%	100	33,380,000	100	33,380,000	100	33,380,000	100	33,380,000	100	33,380,000	100	33,380,000
<b>Sub Kegiatan : Kunjungan Kerja dalam Daerah</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Kali	50	33,380,000	50	33,380,000	50	33,380,000	50	33,380,000	50	33,380,000	50	33,380,000
<b>Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD</b>														
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase tugas pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Jumlah tugas yang difasilitasi dibagi jumlah tugas yang dilaksanakan dikali seratus	%	100	7,957,389,000	100	7,957,389,000	100	7,957,389,000	100	7,957,389,000	100	7,957,389,000	100	7,957,389,000
<b>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah koordinasi/konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Kali	705	7,957,389,000	705	7,957,389,000	705	7,957,389,000	705	7,957,389,000	705	7,957,389,000	705	7,957,389,000
<b>SUBBAGIAN PERSIDANGAN DAN HUMAS</b>														
<b>Program : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>														
INDIKATOR PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase penuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dibagi jumlah anggota dprd dikali seratus	%	100	1,274,490,500	100	1,401,939,550	100	1,542,133,505	100	1,696,346,856	100	1,865,981,541	100	2,052,579,695
<b>Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>														
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Persentase perda/peraturan DPRD yang disepakati	Jumlah perda/peraturan dprd yang di sepakati dibagi jumlah perda/peraturan dprd yang diusulkan dikali seratus	%	100	1,083,758,000	100	1,192,133,800	100	1,311,347,180	100	1,442,481,898	100	1,586,730,088	100	1,745,403,097
<b>Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Perda</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah rancangan perda DPRD		Dok	6	258,699,000	6	284,568,900	6	313,025,790	6	344,328,369	6	378,761,206	6	416,637,326
<b>Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</b>														
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.										
Jumlah dokumen penjelasan/keterangan dan/atau NA yang difasilitasi		dok	6	813,557,000	6	894,912,700	6	984,403,970	6	1,082,844,367	6	1,191,128,804	6	1,310,241,684

Sub Kegiatan : Penyusunan Tata Tertib												
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025	
			TARGET	Rp.								
Jumlah dokumen tata tertib DPRD		Dok	1	11.502.000	1	12.652.200	1	13.917.420	1	15.309.162	100	16.840.078
<b>Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD</b>												
INDIKATOR KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025	
			TARGET	Rp.								
Persentase anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah seluruh anggota DPRD dikali seratus	%	100	190.732.500	100	209.805.750	100	230.786.325	100	253.864.958	100	279.251.453
<b>Sub Kegiatan : Publikasi dan Dokumentasi Dewan</b>												
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025	
			TARGET	Rp.								
Jumlah publikasi dan dokumentasi		Kali	310	150.515.500	310	165.567.050	310	182.123.755	310	200.336.131	310	220.369.744
<b>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>												
INDIKATOR SUB KEGIATAN	META INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025	
			TARGET	Rp.								
Jumlah pengaduan		pengaduan	5	40.217.000	4	44.238.700	3	48.662.570	2	53.528.827	1	58.881.710

Taliwang, September 2021

Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat,

Ir.Irhas R.Rayes, M.Si.

NIP. 19651102 199003 1 011